

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan OPD yang Dinilai	: Urusan Penunjang Pemerintahan dan Tugas Perbantuan di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
Sumber Data	: RPJMD Kab. Gunungkidul dan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
Tujuan Strategis	1 Mewujudkan Sumberdaya Aparatur yang Profesional	
	2	
Sasaran Strategis	1 Aparatur yang Kompeten dan Profesional Meningkat	
	2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	
	3	
IKU OPD	IKU	2025
	1 Aparatur yang kompeten dan profesional meningkat	
	2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	
IKK	1 Indeks Profesionalitas ASN	100
	2 Nilai AKIP	81,65
	3	
Program	1 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	100%
	2 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	100%
	3 Program Kepegawaian Daerah	100%
	4 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	100%
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	1 Indeks Profesional ASN	100
	2 Nilai AKIP	81,65
	3	
	1 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	100%
	2 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	100%
	3 Program Kepegawaian Daerah	100%
	4 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	100%

Gunungkidul, 9 Juli 2024
 Plh. Kepala BKPPD



 REN LINAWATI, S.Sos
 NIP. 197210311996032002

Identifikasi Risiko Strategis

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY								
Nama OPD		: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah								
Tahun Penilaian		: 2024								
Periode yang dinilai		: 2025								
Tujuan Strategis		: Mewujudkan Sumberdaya Aparatur yang Profesional								
Urusan Pemerintahan		: Urusan Penunjang Pemerintahan dan Tugas Perbantuan di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan								
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan: Mewujudkan Sumberdaya Aparatur yang Profesional									
	Sasaran: 1.1. Aparatur yang Kompeten dan Profesional Meningkat	Indeks Profesionalitas ASN	Pelayanan administrasi kepegawaian tidak profesional	RSO.25.38.04.01	Kepala	Kurangnya kompetensi petugas pemberi layanan	internal dan eksternal	C	Indeks Profesionalitas ASN rendah	ASN, BKPPD, Pemerintah Daerah
	Sasaran: 1.2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum optimal	RSO.25.38.04.02	Kepala	Kurangnya pemahaman dan komitmen PD	internal dan eksternal	C	Nilai LKJiP tidak sesuai target	BKPPD

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY		
Tahun Penilaian	: 2025		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Penunjang Pemerintahan dan Tugas Perbantuan di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan		
OPD yang Dinilai	: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD)		
Sumber Data	Renja BKPPD Tahun 2025		
Tujuan Strategis	1 Mewujudkan Sumberdaya Aparatur yang Profesional		
	2		
Program dan Kegiatan Utama	1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	
	2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	
	3	Program Kepegawaian Daerah	
	4	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5		
	6		
	7		
	8		
Keluaran/Hasil Kegiatan			
	Program/Kegiatan	Indikator	Target
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100%
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Jumlah ASN yang Lulus Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota (Laporan)	5 laporan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik	100%
	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan PD Tersusun (Dokumen)	7 dokumen
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tersusun Tepat Waktu (Laporan)	4 laporan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Terlayani dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Laporan)	3 laporan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Terpenuhi (Laporan)	7 laporan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksana (Unit)	15 unit
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Jasa Penunjang Terpenuhi (Laporan)	3 laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksana (Unit)	55 unit
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Terlaksananya Layanan Dan Fasilitas Administrasi Kepegawaian (%)	100%
	Pengadaan, Pemberhentian dan Infromasi Kepegawaian ASN	Jumlah Pengadaan Pegawai Sesuai Formasi, Pensiun Tepat Waktu dan Tersedianya Data yang Up To Date (Dokumen)	3 dokumen

	Mutasi dan Promosi	Jumlah Pengisian Jabatan Struktural dan Mutasi ASN Sesuai Kompetensi Serta Kenaikan Pangkat ASN Tepat Waktu (Dokumen)	3 dokumen
	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN (Dokumen)	2 dokumen
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Penilaian Kinerja Tepat Waktu dan Pemberian Penghargaan ASN Serta Kasus ASN yang terselesaikan (Laporan)	6 laporan
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN Yang Meningkatkan Kompetensi Teknis Dan Fungsionalnya (%)	100%
	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Lulus Diklat Teknis dan Fungsional (Orang)	300 orang
<p>Gunungkidul, 9 Juli 2024 Plh. Kepala BKPPD  RENI LINAWATI, S.Sos NIP. 197210311996032002</p> 			

Identifikasi Risiko Operasional Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY										
Nama OPD		: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD)										
Tahun Penilaian		: 2023										
Periode yang dinilai		: 2025										
Tujuan Strategis		Mewujudkan Sumberdaya Aparatur yang Profesional										
Sasaran strategis OPD		Aparatur yang Kompeten dan Profesional Meningkatkan										
Urusan Pemerintahan		: Urusan Penunjang Pemerintahan dan Tugas Perbantuan di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan										
No	Program/Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)			C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Persentase)	Pelaksanaan	Urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan tidak optimal	ROO.25.38.04.01	Kepala UPT Balai Diklat	Perubahan kebijakan baik ditingkat provinsi maupun nasional	eksternal	UC	Target kinerja urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan tidak tercapai	BKPPD, Sekretariat Daerah	
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Jumlah ASN yang Lulus Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota (Laporan)	Pelaksanaan	ASN tidak bersedia mengikuti diklat keistimewaan	ROO.25.38.04.02	Kepala UPT Balai Diklat	Sarana diklat tidak terpenuhi	eksternal	C	Ketidakpuasan peserta Diklat Keistimewaan terhadap penyelenggaraan diklat.	Peserta Diklat, UPT Balai Diklat, BKPPD	
			Pelaksanaan	Peserta tidak lulus diklat keistimewaan	ROO.25.38.04.03	Kepala UPT Balai Diklat	Perubahan kebijakan pemerintah DIY	eksternal	UC	Internasisasi keistimewaan DIY tidak optimal	ASN, UPT Balai Diklat	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik	Pelaksanaan	Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan tidak sesuai ketentuan dan tidak tepat waktu	ROO.25.38.04.04	Sekretaris	Keterbatasan SDM	Internal	C	Penyelenggaraan pelayanan Publik tidak Optimal	BKPPD	
	Perencanaan Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan PD Tersusun (Dokumen)	Perencanaan	Perencanaan anggaran tidak berdasarkan kebutuhan	ROO.25.38.04.05	Sekretaris	Kesalahan perhitungan atas kebutuhan anggaran	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan tidak optimal	BKPPD	
			Pelaksanaan	Penyajian perencanaan tidak tepat waktu	ROO.25.38.04.06	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	Keterbatasan waktu perencanaan, pengumpulan data dari pelaksana	Internal	C	Perencanaan Daerah terganggu	Pemerintah Daerah	

No	Program/Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Pelaksanaan	Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan SHBJ	ROO.25.38.04.07	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	SHBJ terbaru belum tersosialisasikan	internal	C	Pertanggungjawaban tidak efisien dan ekonomis serta berpotensi atas	BKPPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tersusun Tepat Waktu (Laporan)	Pelaksanaan	penatausahaan keuangan tidak akuntabel	ROO.25.38.04.08	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	verifikasi berjenjang kurang optimal	Internal	C	Merugikan Pemerintah Daerah	BKPPD, Pemerintah Daerah
			Pelaksanaan	penatausahaan keuangan tidak tepat waktu	ROO.25.38.04.09	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	koordinasi internal kurang optimal	Internal	C	Laporan keuangan tidak bisa disajikan tepat waktu	BKPPD, Pemerintah Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Terlayani dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Laporan)	Pelaksanaan	Penyajian administrasi kepegawaian tidak tepat waktu	ROO.25.38.04.10	Kasubag. Umum	Kurangnya Koordinasi Internal	Internal	C	Penundaan hak kepegawaian pegawai BKPPD	Pegawai BKPPD, BKPPD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Terpenuhi (Laporan)	Perencanaan	pelayanan administrasi umum tidak optimal	ROO.25.38.04.11	Kasubag. Umum	keterbatasan layanan yang dapat dilaksanakan	Internal dan Eksternal	C	pelaksanaan kinerja BKPPD tidak optimal	BKPPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksana (Unit)	Perencanaan	Pengadaan BMD Penunjang tidak optimal	ROO.25.38.04.12	Kasubag. Umum	keterbatasan BMD yang dapat diadakan	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan tidak optimal	BKPPD
			Pelaksanaan	Kemahalan harga pengadaan	ROO.25.38.04.13	Kasubag. Umum	Fraud	Internal dan Eksternal	C	Merugikan Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	Pelaksanaan	Pelaksanaan layanan penunjang Pemerintah Daerah tidak Optimal	ROO.25.38.04.14	Kasubag. Umum	Kurangnya koordinasi internal	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan tidak optimal	BKPPD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	ROO.25.38.04.15	Kasubag. Umum	Perubahan kebutuhan pemeliharaan berubah sesuai dengan perkembangan di tahun berjalan	Internal	C	Pemeliharaan kurang optimal	BKPPD

No	Program/Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Terlaksananya Layanan Dan Fasilitas Administrasi Kepegawaian (%)	Pelaksanaan	Keterlambatan dan ketidaktepatan layanan dan fasilitas administrasi kepegawaian	ROO.25.38.04.16	Kepala BKPPD	Keterbatasan SDM, Keterbatasan pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku. Perubahan kebijakan baik Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Pusat	Internal dan Eksternal	C	Ketidakpuasan ASN terhadap pelayanan BKPPD	ASN, BKPPD
	Pengadaan, Pemberhentian dan informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Pengadaan Pegawai Sesuai Formasi, Pensiun Tepat Waktu dan Tersedianya Data yang Up To Date (Dokumen)	Pelaksanaan	Jumlah formasi pegawai yang ditetapkan tidak sesuai dengan formasi yang diusulkan	ROO.25.38.04.17	Kepala BKPPD	Hasil analisis Kemenpan RB terhadap kebutuhan formasi berbeda dengan usulan Pemkab. Gununkigul	eksternal	UC	Kekurangan pegawai	Pemerintah Daerah
			Pelaksanaan	Jumlah calon pegawai yang diterima tidak sesuai dengan jumlah formasi yang ditetapkan.	ROO.25.38.04.18	Kepala BKPPD	Nilai yang diperoleh peserta seleksi tidak memenuhi <i>passing grade</i> .	eksternal	UC	Kekurangan pegawai	Pemerintah Daerah
			Pelaksanaan	Keterlambatan penerbitan SK Pensiun PNS	ROO.25.38.04.19	Kepala Bidang Mutasi	ASN dan Petugas kurang memperhatikan SOP pengusulan pensiun. Perubahan kebijakan pemerintah.	Internal dan Eksternal	C	Ketidakpuasan PNS terhadap pelayanan BKPPD. Keterlambatan PNS dalam menerima manfaat pensiun.	PNS, BKPPD
			Pelaksanaan	Keterlambatan dalam pembaruan data dan penyajian informasi kepegawaian.	ROO.25.38.04.20	Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai	Kekurangan SDM. Kekurangan aplikasi pengelolaan data kepegawaian.	internal	C	Kekurangcepatan dalam pengambilan keputusan. Data dan informasi kepegawaian tidak <i>up to date</i>	BKPPD, Pemerintah Daerah
			Pelaksanaan	Kesalahan data kepegawaian yang di <i>input</i>	ROO.25.38.04.21	Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai	Kekurangcermatan petugas dalam melakukan <i>input data</i>	internal	C	Ketidaktepatan dalam manajemen PNS	PNS, BKPPD, Pemerintah Daerah

No	Program/Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Mutasi dan Promosi	Jumlah Pengisian Jabatan Struktural dan Mutasi ASN Sesuai Kompetensi Serta Kenaikan Pangkat ASN Tepat Waktu (Dokumen)	Pelaksanaan	Ketidaksesuaian kompetensi PNS dengan jabatan struktural yang diisi.	ROO.25.38.04.22	Kepala BKPPD	Keterbatasan jumlah dan komposisi PNS yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan. Kebijakan Pejabat Pembina Kepegawaian	Internal dan Eksternal	C	Target tidak tercapai. Tidak optimalnya pelaksanaan pekerjaan.	PNS, BKPPD, Pemerintah Daerah
			Pelaksanaan	Lambatnya proses mutasi keluar dan mutasi masuk Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	ROO.25.38.04.23	Kepala BKPPD	Kurangnya komitmen petugas untuk melaksanakan sesuai tata kala yang telah ditetapkan. Kebijakan pejabat yang berwenang.	Internal dan Eksternal	C	Ketidakpuasan PNS terhadap pelayanan BKPPD.	PNS, BKPPD, Pemerintah Daerah
			Pelaksanaan	Proses alih tugas dalam daerah tidak normatif	ROO.25.38.04.24	Kepala BKPPD	Kurangnya komitmen PNS, petugas, dan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan alih tugas yang normatif, obyektif dan sesuai aturan yang berlaku.	Internal dan Eksternal	C	Menurunkan integritas Pemerintah Daerah	PNS, BKPPD, Pemerintah Daerah
			Pelaksanaan	Keterlambatan penyelesaian proses kenaikan pangkat	ROO.25.38.04.25	Kepala Bidang Mutasi	Kurangnya komunikasi, konsultasi, dan koordinasi antara pihak terkait.	Internal dan Eksternal	C	Tertundanya kenaikan pangkat PNS beserta hak-hak yang mengikutinya. Ketidakpuasan PNS terhadap pelayanan kepegawaian	PNS, BKPPD
	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN (Dokumen)	Pelaksanaan	Tidak terlaksananya pengiriman diklat struktural.	ROO.25.38.04.26	Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai	Tidak adanya nota kesepahaman dengan lembaga penyelenggara diklat struktural	eksternal	UC	Terhambatnya karier PNS ke jenjang pangkat atau jabatan yang lebih tinggi	PNS, Pemerintah Daerah

No	Program/Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Pelaksanaan	PNS yang melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri tidak mempunyai surat tugas belajar mandiri	ROO.25.38.04.27	Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai	Kurangnya pemahaman ASN dan PD terhadap kaidah-kaidah tugas belajar mandiri. Kurangnya sosialisasi ketentuan iin belajar.	Internal dan Eksternal	C	Terhambatnya peningkatan pendidikan dan pencantuman gelar akademis ke dalam administrasi kepegawaian.	PNS, BKPPD
			Pelaksanaan	Tidak adanya PNS yang mengikuti pendidikan tugas belajar dengan biaya pemerintah baik pusat maupun daerah	ROO.25.38.04.28	Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai	Rendahnya antusiasme PNS untuk mengikuti pendidikan tugas belajar.	Internal dan Eksternal	UC	Target tidak tercapai	Pemerintah Daerah
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Penilaian Kinerja Tepat Waktu dan Pemberian Penghargaan ASN Serta Kasus ASN yang terselesaikan (Laporan)	Pelaksanaan	Keterlambatan penyampaian laporan kinerja PNS	ROO.25.38.04.29	Kepala Bidang Status, Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai	Keterlambatan Admin OPD dalam penyampaian laporan kinerja.	Internal dan Eksternal	C	Tidak tercapainya target kinerja PD. Terhambatnya administrasi kepegawaian PNS	PNS, PD, BKPPD
			Pelaksanaan	Terlambatnya pemberian penghargaan kepada pegawai yang berhak	ROO.25.38.04.30	Kepala Bidang Status, Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai	Kurangnya perhatian PNS/OPD terhadap tatakala pengusulan penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Keterlambatan admin OPD dalam memenuhi administrasi pemberian TPP	Internal dan Eksternal	C	PNS kehilangan / tertunda haknya untuk mendapat penghargaan. Ketidakpuasan PNS terhadap pelayanan administrasi kepegawaian.	PNS, PD, BKPPD
			Pelaksanaan	Tidak terlaksananya sosialisasi dan pembinaan disiplin	ROO.25.38.04.31	Kepala Bidang Status, Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai	Keterbatasan waktu	eksternal	UC	Target kinerja tidak tercapai. Penegakan disiplin tidak optimal	BKPPD, Pemerintah Daerah

Hasil Analisis Risiko

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Tahun Penilaian : 2025 Tujuan Strategis : Mewujudkan Sumberdaya Aparatur yang Profesional Aparatur yang Kompeten dan Profesional Meningkatkan Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang Pemerintahan dan Tugas Perbantuan di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan										
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi			Analisis Risiko Sebelum Pengendalian			Pengendalian yang telah ada (pengendalian terpasang)	Analisis Risiko pasca pengendalian		
	Program/Kegiatan	Resiko	Kode Risiko	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko		Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f	g	h	i		
1	Risiko Operasional									
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Urusan kelembagaan dan kelatalaksanaan tidak optimal	ROO.25.38.04.01	4	3	17	Koordinasi dengan Pemerintah DIY	4	2	13
2	Peningkatan Budaya Pemerintahan	ASN tidak bersedia mengikuti diklat keistimewaan	ROO.25.38.04.02	1	4	6	Mengajukan penyesuaian SHBJ	1	3	4
3	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Peserta tidak lulus diklat keistimewaan	ROO.25.38.04.03	4	3	17	Koordinasi dengan Paniradya Keistimewaan	4	2	13
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan tidak sesuai ketentuan dan tidak tepat waktu	ROO.25.38.04.04	3	3	14	Melakukan koordinasi internal	3	2	11
5	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan anggaran tidak berdasarkan kebutuhan	ROO.25.38.04.05	4	3	17	Melakukan koordinasi internal	4	1	8
6	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyajian perencanaan tidak tepat waktu	ROO.25.38.04.06	4	2	13	Melakukan koordinasi internal	4	1	8
7	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan SHBJ	ROO.25.38.04.07	4	2	13	Pencantuman anggaran dengan SHBJ terbaru	4	1	8
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	penatausahaan keuangan tidak akuntabel	ROO.25.38.04.08	4	3	17	Verifikasi berjenjang	4	2	13
9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	penatausahaan keuangan tidak tepat waktu	ROO.25.38.04.09	4	2	13	Melakukan koordinasi internal	4	1	8
10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyajian administrasi kepegawaian tidak tepat waktu	ROO.25.38.04.10	4	3	17	Melakukan koordinasi internal	4	1	8
11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	pelayanan administrasi umum tidak optimal	ROO.25.38.04.11	3	3	14	Melakukan koordinasi internal	3	1	5
12	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan BMD Penunjang tidak optimal	ROO.25.38.04.12	3	3	14	Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2024	3	1	5
13	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kemahalan harga pengadaan	ROO.25.38.04.13	3	3	14	Verifikasi berjenjang	3	2	11
14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan layanan penunjang Pemerintah Daerah tidak Optimal	ROO.25.38.04.14	3	3	14	Perencanaan kebutuhan	3	2	11

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi			Analisis Risiko Sebelum Pengendalian			Pengendalian yang telah ada (pengendalian terpasang)	Analisis Risiko pasca pengendalian		
	Program/Kegiatan	Resiko	Kode Risiko	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko		Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f	g	h	i		
15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	ROO.25.38.04.15	3	3	14	Melakukan koordinasi internal	3	2	11
16	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Keterlambatan dan ketidaktepatan layanan dan fasilitasi administrasi kepegawaian	ROO.25.38.04.16	3	3	14	Meningkatkan kompetensi dan kapasitas pengelola kepegawaian	3	2	11
17	Pengadaan, Pemberhentian dan informasi Kepegawaian ASN	Jumlah formasi pegawai yang ditetapkan tidak sesuai dengan formasi yang diusulkan	ROO.25.38.04.17	3	4	16	Melakukan koordinasi dan audiensi dengan Kemenpan RB	3	4	16
18	Pengadaan, Pemberhentian dan informasi Kepegawaian ASN	Jumlah calon pegawai yang diterima tidak sesuai dengan jumlah formasi yang ditetapkan.	ROO.25.38.04.18	3	4	16	Meningkatkan publikasi rekrutmen CPNS	3	3	14
19	Pengadaan, Pemberhentian dan informasi Kepegawaian ASN	Keterlambatan penerbitan SK Pensiun PNS	ROO.25.38.04.19	2	3	10	Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi antara	2	2	7
20	Pengadaan, Pemberhentian dan informasi Kepegawaian ASN	Keterlambatan dalam pembaruan data dan penyajian informasi kepegawaian.	ROO.25.38.04.20	3	2	11	meningkatkan kapasitas aplikasi pengolah data kepegawaian	3	1	5
21	Pengadaan, Pemberhentian dan informasi Kepegawaian ASN	Kesalahan data kepegawaian yang di input	ROO.25.38.04.21	4	3	17	Melakukan validasi berjenjang terhadap data kepegawaian yang di <i>input</i>	4	2	13
22	Mutasi dan Promosi	Ketidaksesuaian kompetensi PNS dengan jabatan struktural yang diisi.	ROO.25.38.04.22	4	3	17	Mengoptimalkan pengukuran kompetensi pegawai yang akan memangku jabatan.	4	2	13
23	Mutasi dan Promosi	Lambatnya proses mutasi keluar dan mutasi masuk Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	ROO.25.38.04.23	3	4	16	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Kemendagri, BKN, dan BKD DIY	3	3	14
24	Mutasi dan Promosi	Proses alih tugas dalam daerah tidak normatif	ROO.25.38.04.24	2	4	12	Meningkatkan komitmen dan integritas pejabat yang berwenang untuk melaksanakan proses normatif sesuai ketentuan yang berlaku	2	3	10
25	Mutasi dan Promosi	Keterlambatan penyelesaian proses kenaikan pangkat	ROO.25.38.04.25	3	3	14	meningkatkan sosialisasi dan koordinasi dengan PD, BKD DIY, dan BKN	3	2	11
26	Pengembangan Kompetensi ASN	Tidak terlaksananya pengiriman diklat struktural.	ROO.25.38.04.26	4	4	19	Koordinasi dengan jajaran TAPD	4	3	17
27	Pengembangan Kompetensi ASN	PNS yang melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri tidak mempunyai surat tugas belajar mandiri	ROO.25.38.04.27	3	2	11	Meningkatkan sosialisasi ketentuan tugas belajar mandiri	3	1	5
28	Pengembangan Kompetensi ASN	Tidak adanya PNS yang mengikuti pendidikan tugas belajar dengan biaya pemerintah baik pusat maupun daerah	ROO.25.38.04.28	1	3	4	Meningkatkan sosialisasi kepada Perangkat Daerah	1	2	2

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi			Analisis Risiko Sebelum Pengendalian			Pengendalian yang telah ada (pengendalian terpasang)	Analisis Risiko pasca pengendalian		
	Program/Kegiatan	Resiko	Kode Risiko	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko		Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	d	e	f	g	h	i
29	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Keterlambatan penyampaian laporan kinerja PNS	ROO.25.38.04.29	4	3	17	Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara rutin	4	2	13
30	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlambatnya pemberian penghargaan kepada pegawai yang berhak	ROO.25.38.04.30	2	2	7	Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara rutin	2	1	3
31	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tidak terlaksananya sosialisasi dan pembinaan disiplin	ROO.25.38.04.31	1	3	4	Melakukan identifikasi metode sosialisasi peraturan disiplin yang tepat, efektif dan efisien.	1	2	2
32	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tidak terlaksananya penyelesaian kasus pelanggaran disiplin	ROO.25.38.04.32	2	2	7	Perencanaan penyelesaian pada tahun berikutnya	2	1	3
33	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tidak terjadi peningkatan kompetensi SDM	ROO.25.38.04.33	3	2	11	Melakukan analisis kebutuhan diklat.	3	1	5
34	Pengembangan Kompetensi Teknis	Diklat teknis tidak terlaksana	ROO.25.38.04.34	2	2	7	Melakukan koordinasi dengan jajaran TAPD	3	1	5
II Risiko Strategis										
Tujuan: Mewujudkan Sumberdaya Aparatur yang Profesional										
	Sasaran: 1.1. Aparatur yang Kompeten dan Profesional Meningkat	Pelayanan administrasi kepegawaian tidak profesional	RSO.25.38.04.01	4	4	19	Meningkatkan diklat teknis dan mengoptimalkan penilaian kinerja	4	3	17
	Sasaran: 1.2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum optimal	RSO.25.38.04.02	3	3	14	Koordinasi internal	3	2	11
00										

Daftar Risiko Prioritas

Nama Perangkat Daerah		: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD)					
Tahun Penilaian		: 2025					
Tujuan Strategis		Mewujudkan Sumberdaya Aparatur yang Profesional Aparatur yang Kompeten dan Profesional Meningkat					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Penunjang Pemerintahan dan Tugas Perbantuan di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan					
No	Risiko Prioritas			Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
	Program/Kegiatan	Risiko	Kode Risiko				
a	b		c	d	e	f	g
1	Risiko Operasional PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Urusan kelembagaan dan kelatalaksanaan tidak optimal	ROO.25.38.04.01	13	Kepala UPT Balai Diklat	Perubahan kebijakan baik ditingkat provinsi maupun nasional	Target kinerja urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan tidak tercapai
2	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Peserta tidak lulus diklat keistimewaan	ROO.25.38.04.03	13	Kepala UPT Balai Diklat	Perubahan kebijakan pemerintah DIY	Internasisasi keistimewaan DIY tidak optimal
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	penatausahaan keuangan tidak akuntabel	ROO.25.38.04.08	13	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	verifikasi berjenjang kurang optimal	Merugikan Pemerintah Daerah
4	Pengadaan, Pemberhentian dan informasi Kepegawaian ASN	Jumlah formasi pegawai yang ditetapkan tidak sesuai dengan formasi yang diusulkan	ROO.25.38.04.17	16	Kepala BKPPD	Hasil analisis Kemenpan RB terhadap kebutuhan formasi berbeda dengan usulan Pemkab. Gunungkigul	Kekurangan pegawai
5	Pengadaan, Pemberhentian dan informasi Kepegawaian ASN	Jumlah calon pegawai yang diterima tidak sesuai dengan jumlah formasi yang ditetapkan.	ROO.25.38.04.18	14	Kepala BKPPD	Nilai yang diperoleh peserta seleksi tidak memenuhi passing grade.	Kekurangan pegawai

No	Risiko Prioritas			Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
	Program/Kegiatan	Risiko	Kode Risiko				
6	Pengadaan, Pemberhentian dan informasi Kepegawaian ASN	Kesalahan data kepegawaian yang di input	ROO.25.38.04.21	13	Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai	Kekurangcermatan petugas dalam melakukan input data	Ketidaktepatan dalam manajemen PNS
7	Mutasi dan Promosi	Ketidaksesuaian kompetensi PNS dengan jabatan struktural yang diisi.	ROO.25.38.04.22	13	Kepala BKPPD	Keterbatasan jumlah dan komposisi PNS yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan. Kebijakan Pejabat Pembina Kepegawaian	Target tidak tercapai. Tidak optimalnya pelaksanaan pekerjaan.
8	Mutasi dan Promosi	Lambatnya proses mutasi keluar dan mutasi masuk Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	ROO.25.38.04.23	14	Kepala BKPPD	Kurangnya komitmen petugas untuk melaksanakan sesuai tata kala yang telah ditetapkan. Kebijakan pejabat yang berwenang.	Ketidakpuasan PNS terhadap pelayanan BKPPD.
9	Pengembangan Kompetensi ASN	Tidak terlaksananya pengiriman diklat struktural.	ROO.25.38.04.26	17	Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai	Tidak adanya nota kesepahaman dengan lembaga penyelenggara diklat struktural	Terhambatnya karier PNS ke jenjang pangkat atau jabatan yang lebih tinggi
10	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Keterlambatan penyampaian laporan kinerja PNS	ROO.25.38.04.29	13	Kepala Bidang Status, Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai	Keterlambatan Admin OPD dalam penyampaian laporan kinerja.	Tidak tercapainya target kinerja PD. Terhambatnya administrasi kepegawaian PNS

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

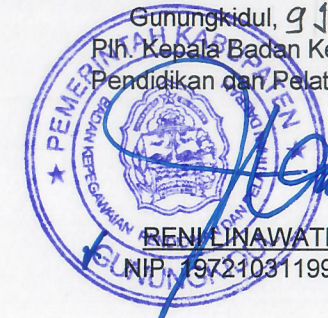
Nama Perangkat Daerah		: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD)						
Tahun Penilaian		: 2025						
Tujuan Strategis		Mewujudkan Sumberdaya Aparatur yang Profesional Aparatur yang Kompeten dan Profesional Meningkat						
Urusan Pemerintahan		: Urusan Penunjang Pemerintahan dan Tugas Perbantuan di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan						
No	Risiko Prioritas			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program/Kegiatan	Risiko	Kode Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	
I Risiko Operasional								
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Urusan kelembagaan dan kelatalaksanaan tidak optimal	ROO.25.38.04.01	Koordinasi dengan Pemerintah DIY	capaian kinerja tidak maksimal	peningkatan kompetensi penyelenggara diklat, koordinasi dengan paniradya pati	Kepala UPT Balai Diklat	Maret
2	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Peserta tidak lulus diklat keistimewaan	ROO.25.38.04.03	Koordinasi dengan Paniradya Keistimewaan	capaian kinerja tidak maksimal	peningkatan kompetensi penyelenggara diklat, koordinasi dengan paniradya pati	Kepala UPT Balai Diklat	Januari s.d. Maret
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	penatausahaan keuangan tidak akuntabel	ROO.25.38.04.08	Verifikasi berjenjang	keterbatasan SDM	Peningkatan kompetensi pegawai dan proses verifikasi berjenjang	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	Maret
4	Pengadaan, Pemberhentian dan informasi Kepegawaian ASN	Jumlah formasi pegawai yang ditetapkan tidak sesuai dengan formasi yang diusulkan	ROO.25.38.04.17	Melakukan koordinasi dan audiensi dengan Kemenpan RB	kurangnya data dan informasi pendukung	Meningkatkan intensitas koordinasi internal dan eksternal	Kepala BKPPD	Januari s.d. Desember

No	Risiko Prioritas			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program/Kegiatan	Risiko	Kode Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	
5	Pengadaan, Pemberhentian dan informasi Kepegawaian ASN	Jumlah calon pegawai yang diterima tidak sesuai dengan jumlah formasi yang ditetapkan.	ROO.25.38.04.18	Meningkatkan publikasi rekrutmen CPNS	keterbatasan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan	Memperluas rumpun kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan	Kepala BKPPD	Januari s.d. Desember
6	Pengadaan, Pemberhentian dan informasi Kepegawaian ASN	Kesalahan data kepegawaian yang di input	ROO.25.38.04.21	Melakukan validasi berjenjang terhadap data kepegawaian yang di input	kekurangcermatan SDM	Meningkatkan intensitas monitoring, evaluasi dan pendampingan	Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai	Januari s.d. Desember
7	Mutasi dan Promosi	Ketidaksesuaian kompetensi PNS dengan jabatan struktural yang diisi.	ROO.25.38.04.22	Mengoptimalkan pengukuran kompetensi pegawai yang akan memangku jabatan.	integritas pejabat berwenang	Meningkatkan komitmen pejabat yang berwenang	Kepala BKPPD	Januari
8	Mutasi dan Promosi	Lambatnya proses mutasi keluar dan mutasi masuk Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	ROO.25.38.04.23	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Kemendagri, BKN, dan BKD DIY	kekurangpahaman petugas terhadap tata kala proses mutasi	Meningkatkan monitoring dan evaluasi	Kepala BKPPD	Januari s.d. Desember
9	Pengembangan Kompetensi ASN	Tidak terlaksananya pengiriman diklat struktural.	ROO.25.38.04.26	Koordinasi dengan jajaran TAPD	kurangnya pemahaman tentang urgensi diklat struktural bagi PNS dan Pemerintah	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan TAPD	Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai	Januari s.d. Desember
10	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Keterlambatan penyampaian laporan kinerja PNS	ROO.25.38.04.29	Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara rutin	Kurangnya pemahaman PNS dalam menyusun dan melakukan penilaian kinerja	Meningkatkan intensitas koordinasi dengan Admin dan Kepala Perangkat Daerah	Kepala Bidang Status, Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai	Januari s.d. Desember
II	Risiko Strategis							
	Tujuan: Mewujudkan Sumberdaya Aparatur yang Profesional							

No	Risiko Prioritas			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program/Kegiatan	Risiko	Kode Risiko					
a	b		c	d	e	f	g	h
1	Sasaran: 1.1. Aparatur yang Kompeten dan Profesional Meningkat	Pelayanan administrasi kepegawaian tidak profesional	RSO.25.38.04.01	Meningkatkan diklat teknis dan mengoptimalkan penilaian kinerja	Kurangnya pemahaman terhadap manajemen kepegawaian	Sosialisasi peraturan kepegawaian	Kepala BKPPD	Januari s.d. Desember

Gunungkidul, 9 Juli 2024

Rh. Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah



RENI LINAWATI, S.Sos
NIP. 197210311996032002